

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.

Pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang memikirkan bagaimana menjalani kehidupan sebagai upaya mempertahankan hidup manusia dalam mengemban tugas sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Karena dengan pendidikan generasi penerus bangsa dapat membentuk dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, baik dan bertanggung jawab, Ki Hajar Dewantara dalam (diwarta 2013 tanpa halaman) mengungkapkan bahwa:

Pendidikan merupakan proses pembudayaan yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan.

Pendidikan hendaknya mampu mengembangkan potensi siswa sehingga mereka mampu menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan yang ada saat ini dan akan datang. Salah satu masalah yang dihadapi pendidikan adalah proses pembelajaran yang masih diarahkan pada aspek kognitif saja, menekankan pada fakta dan informasi, menghafal, dan lebih

mementingkan isi daripada proses, serta kurang mengarahkan siswa pada pembelajaran yang menghubungkan dirinya dengan kehidupan sehari-hari. Tugas, metode, bahan pelajaran disajikan secara keseluruhan, keberhasilan siswa ditentukan oleh guru, siswa kurang dilibatkan dalam pemecahan masalah, materi pelajaran tidak mengaitkan isu-isu yang kontemporer.

Isu kontemporer yang terpenting di negara kita sekarang adalah "kreativitas". Kalau kita ingin menuju bangsa yang cerdas, pasti kemampuan untuk mengkritik, menganalisa, sintesis, inovasi, kreativitas, dan lain-lain, sangat penting untuk anak-anak kita. Pada prakteknya penerapan proses pembelajaran kurang mendorong pada pencapaian kreativitas berdasarkan kemampuan berpikir kritis. Dua faktor penyebab berpikir kritis tidak berkembang selama pendidikan adalah kurikulum yang umumnya dirancang dengan target materi yang luas sehingga guru lebih terfokus pada penyelesaian materi dan kurangnya pemahaman guru tentang metode pengajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis.

Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 (dalam Haryono 2013 tanpa halaman)

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu pendidikan yang memfokuskan pembelajaran pada pembentukan kreativitas siswa yang didasari oleh kemampuan berpikir kritis yaitu pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dalam tinjauan pedagogik, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat dikatakan merupakan kajian keilmuan, program kurikuler, dan aktivitas sosial-kultural yang bersifat multidimensional. Sifat multidimensional ini menyebabkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai: pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan

kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi.

Menurut Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud, 2014 tanpa halaman) menyatakan bahwa:

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali siswa dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Melalui pembelajaran PPKn, siswa dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. pembahasannya secara utuh mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Yang diterjemahkan dalam tata cara kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai universal kemanusiaan dalam implementasinya.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki visi, misi, tujuan, dan struktur keilmuan mata pelajaran. Visi PPKn adalah suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan misi mata pelajaran PPKn adalah sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, kesadaran akan norma dan konstitusi UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembangan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penghayatan terhadap filosofi *Bhinneka Tunggal Ika*. Hal itu sejalan dengan tujuan mata pelajaran PPKn menurut Somantri (2001, hlm 279) dalam maksum (2011, hlm 51):

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan mendidik warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, tanggung jawab, dan Pancasila sejati.

Mengacu pada tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para siswa menjadi warga negara yang cerdas dan baik */to be smart and good citizen* berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan */knowledge*, sikap dan nilai */attitude and value*, keterampilan/kecakapan */Skills*, yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sebagai wujud implementasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Senada dengan hal ini Wahab (2006, hlm 62) mengemukakan bahwa "...kewarganegaraan yang dikembangkan haruslah mengandung pengetahuan, keterampilan-keterampilan, nilai-nilai, dan disposisi yang idealnya dimiliki warganegara". Jika warga negara sudah mencapai aspek-aspek tersebut maka tujuan PPKn sudah dapat dikatakan berhasil.

Dalam pembelajaran PPKn pada praktiknya para siswa mempelajari konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, tugas-tugas lembaga negara dan lain-lain hanya bersifat hafalan (*by product*) dan kurang melibatkan perubahan terhadap perilaku untuk menjadi warga negara yang baik (*by process*).

Pendidikan *Civics* pada perkembangannya bukan hanya meliputi "masalah hak dan kewarganegaraan" serta "pemerintahan" saja, akan tetapi berkembang menjadi "*Community Civics*", "*Economic Civics*", serta "*Vocational Civic*".

Nu'man Somantri mengutip pandangan Van Good (Tahun 2001, hlm 282) "... Gerakan *Community Civic* adalah permulaan dari ingin lebih fungsionalnya pelajaran tersebut bagi para siswa dengan menghadapkan mereka kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Gerakan "*Community Civics*" ini disebabkan pula karena pelajaran *Civics* pada ketika itu hanya mempelajari konstitusi dan pemerintah dengan kurang memperhatikan lingkungan sosial".

Selain gerakan Community Civics, Nu'man Somantri juga mengungkapkan tentang Gerakan Pendidikan Kewarganegaraan, yang ditandai dengan hal-hal dibawah ini:

1. Para pelajar harus terlibat dengan bahan pelajaran.
2. Kegiatan dasar manusia (basic human activities) melandasi bahan pelajaran.
3. Bahan pelajaran Civics harus dikorelasikan atau diintegrasikan dengan bahan-bahan ilmu sosial, sains, teknologi, etika dan agama agar bahan civic education itu fungsional.
4. Bahan pelajaran Civic Education itu harus dapat menumbuhkan berpikir kritis, analitis, kreatif agar para pelajar dapat melatih diri dalam berfikir, bersikap dan berbuat yang sesuai dengan perilaku demokratis, dengan perkataan lain, para pelajar akan dilatih dalam menilai berbagai macam masalah social, ekonomi, politik secara cerdas dan penuh rasa tanggung jawab, agar propaganda serta agitasi politik yang tidak ternilai dapat dihindarkan". (Tahun 1973, hlm 67).

Berkaitan dengan hal tersebut penerapan model *problem based learning* dalam proses pembelajaran PPKn sangat tepat sekali karena model *problem based learning* menurut Depdiknas (2003, hlm 4) dalam komalasari (2013, hlm 59) "...melalui model ini para siswa dapat belajar untuk berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran". Dalam hal ini siswa terlibat dalam penyelidikan untuk memecahkan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai materi pelajaran. Strategi ini mencakup pengumpulan informasi berkaitan dengan pertanyaan, menyintesa, dan mempresentasikan penemuannya kepada orang lain.

Kemampuan dalam berpikir kritis memberikan arahan yang tepat dalam berpikir dan bekerja, dan membantu dalam menentukan keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya dengan lebih akurat. Oleh sebab itu kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam pemecahan masalah / pencarian solusi. Pengembangan kemampuan berpikir kritis merupakan integrasi beberapa bagian pengembangan kemampuan, seperti pengamatan (observasi), analisis, penalaran, penilaian, pengambilan keputusan, dan persuasi. Semakin baik pengembangan kemampuan-kemampuan ini, maka kita akan semakin

dapat mengatasi masalah-masalah kompleks dan dengan hasil yang memuaskan.

Pemikiran kreatif dibutuhkan dalam memecahkan masalah. Kreativitas adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatangunaan, dan keragaman jawaban. Kedua jenis berpikir tersebut merupakan berpikir tingkat tinggi yang harus selalu dilakukan guna menghasilkan ide-ide baru yang inovatif.

Menurut Bern dan Erikson (2001, hlm 5) menegaskan “...bahwa pembelajaran berbasis masalah (*problem-based-learning*) merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Strategi ini meliputi mengumpulkan dan menyatukan informasi, dan mempresentasikan penemuan.”

Dalam kaitan dengan upaya siswa untuk menemukan dan mencari pemecahan terhadap masalah, John Dewey yang dikutip oleh John U. Michaelis (Tim, 2011, hlm 15) secara rinci mengemukakan pendapatnya mengenai proses pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
2. Membandingkan antara masalah yang dihadapi saat ini dengan pengalaman yang baru lalu.
3. Merumuskan kesimpulan sementara.
4. Mengadakan tes terhadap kesimpulan sementara.
5. Menerima atau menolak kesimpulan tersebut (evaluasi).

Dengan demikian dalam proses belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dibutuhkan kemampuan dari setiap siswa untuk berpikir dan bertindak kritis dan kreatif. Sehingga proses pembelajaran berlangsung secara menyeluruh pada seluruh siswa, tidak hanya pada sebagian siswa saja.

Model *Problem Based Learning* (PBL) merupakan model pembelajaran yang menantang dan menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang para siswa untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata /*real*

world. Masalah yang diberikan sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi untuk mengikat rasa ingin tahunya. Seperti yang diutarakan oleh Arends (2008, hlm 12) dalam penelitian rosnawati (2013, hlm 08) bahwa.

Model Pembelajaran Berbasis Masalah /*Problem Based Learning* adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiri, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri.

Konsep Dasar /*Basic Concept* dari kegiatan model *Problem Based Learning* adalah Guru atau fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau *link* dan *skill* yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan ‘peta’ yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran tersebut.

Dalam model pembelajaran berbasis masalah, guru berperan sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, membantu menemukan masalah dan pemberi fasilitas penelitian. Selain itu guru menyiapkan dukungan dan dorongan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inkuiri dan intelektual siswa. Pembelajaran berbasis masalah hanya dapat terjadi jika guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang terbuka (kelas yang demokratis) dan membimbing pertukaran gagasan. Pembelajaran berbasis masalah juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan aktivitas siswa, baik secara individual maupun secara kelompok. Pada model pembelajaran berbasis masalah guru berperan pemberi rangsangan, pembimbing kegiatan siswa dan penentu arah belajar siswa. Penugasan yang diberikan oleh guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar diluar kelas. siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung tentang apa yang sedang dipelajari. Pengalaman belajar merupakan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa dalam rangka mencapai penguasaan standar kompetensi, kemampuan dasar dan materi pembelajaran.

Keunggulan dari model pembelajaran *problem based learning* ini adalah pola pembelajaran dengan pola *learner centred*. Dengan pola tersebut diharapkan siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Belajar dan penilaian merupakan hal yang sangat terkait, budaya belajar yang dianggap baik dalam pembelajaran adalah kooperatif, kolaboratif dan saling mendukung. Penekanan pada penguasaan dan penggunaan pengetahuan yang merefleksikan isu baru dan lama serta menyelesaikan masalah konteks kehidupan nyata. Guru sebagai pendorong dan pemberi fasilitas pembelajaran. Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran secara bersama-sama.

Berdasarkan observasi awal di kelas XI MIA SMA Negeri 1 Cicalengka menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan kelemahan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) antara lain: 1). Dalam proses pembelajaran PPKn siswa hanya diarahkan pada aspek kognitif saja dibandingkan aspek keterampilan, 2). Waktu pembelajaran PPKn yang terlalu sedikit hanya 2 jam pelajaran dalam seminggu, mengakibatkan guru hanya terpaku pada banyaknya materi yang harus disampaikan, 3). Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru cenderung didaktif dan konvensional, 4). Pembelajaran PPKn di kelas kurang kreatif dan menyenangkan bahkan cenderung menjenuhkan dan membosankan, 5). Kurang menyentuh pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari siswa, 6) kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran menuntut guru harus kreatif dan inovatif dalam menggali keterampilan siswa dengan menggunakan fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik secara khusus meneliti tentang **“EFEKTIVITAS MODEL *PROBLEM BASED LEARNING* DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN SISWA”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pembelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 adalah mata pelajaran yang memiliki tujuan mewujudkan warga negara Indonesia yang tahu tentang hak dan kewajiban, serta mampu berkomunikasi, berdiplomasi, dan mengajukan argumentasi yang bisa diterima dalam menghadapi kompetisi di tengah arus globalisasi, namun pada kenyataannya Proses pembelajaran lebih cenderung pada proses hafalan belaka. Hal itu menyebabkan tujuan pembelajaran PPKn tidak tercapai.
2. Proses pembelajaran yang masih diarahkan pada aspek kognitif saja, menekankan pada fakta dan informasi, menghafal, dan lebih mementingkan isi daripada proses, serta kurang mengarahkan siswa pada pembelajaran yang menghubungkan dirinya dengan kehidupan nyata sehari-hari siswa merupakan salah satu masalah yang dihadapi pembelajaran PPKn, untuk itu diperlukan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, menarik dan kreatif untuk dapat meningkatkan keterampilan kewarganegaraan siswa. Salah satunya dengan menggunakan model *problem based learning*.
3. Di dalam pembelajaran siswa adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan, bukan sebagai objek pembelajar dimana siswa hanya diceramahi, diberi materi dan cukup dengan menghafal, dan ketika ulangan mendapat nilai bagus. Hal itu menjadi sebab mata pelajaran PPKn dirasakan siswa sebagai mata pelajaran yang menjenuhkan dan membosankan.

Berdasar identifikasi masalah penelitian di atas, secara umum rumusan masalah penelitian yaitu apakah terdapat peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dengan menggunakan model pembelajaran *problem based learning* (PBL) dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?

Rumusan masalah penelitian secara khusus sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan keterampilan intelektual siswa dari kelas yang menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* dengan kelas kontrol pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?
2. Apakah terdapat perbedaan keterampilan partisipatori siswa dari kelas yang menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* dengan kelas kontrol pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?
3. Bagaimana efektivitas model pembelajaran *Problem Based Learning* dalam meningkatkan keterampilan intelektual siswa di kelas eksperimen?
4. Bagaimana efektivitas model pembelajaran *Problem Based Learning* dalam meningkatkan keterampilan partisipatori siswa di kelas eksperimen?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dengan menggunakan model *problem based learning* (PBL) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Secara khusus tujuan penelitian yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perbedaan keterampilan intelektual siswa dari kelas eksperimen yang menggunakan model *Problem Based Learning* dengan kelas kontrol pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
2. Mengetahui perbedaan keterampilan partisipatori siswa dari kelas eksperimen yang menggunakan model *Problem Based Learning* dengan

kelas kontrol pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

3. Mengetahui efektivitas model pembelajaran *Problem Based Learning* dalam meningkatkan keterampilan intelektual siswa di kelas eksperimen.
4. Mengetahui efektivitas model pembelajaran *Problem Based Learning* dalam meningkatkan keterampilan partisipatori siswa di kelas eksperimen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana ilmu dan memberikan model *Problem Based Learning* (PBL) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk meningkatkan keterampilan kewarganegaraan

Manfaat Praktis:

1. Bagi Peneliti

Memberi pengetahuan yang sangat berharga untuk mengembangkan keahlian menciptakan pembelajaran yang menarik, yang dapat berguna bagi semua pihak.

2. Bagi Guru

Khususnya guru PPKn, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu alternatif cara untuk meningkatkan keterampilan kewarganegaraan siswa.

3. Bagi Siswa

Diharapkan dapat memotivasi terbinanya sikap belajar yang penuh semangat, percaya diri dan membantu siswa untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan.

4. Bagi Sekolah

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah yang bersangkutan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas proses belajar-mengajar serta menciptakan siswa yang berkualitas.

E. Struktur Organisasi Tesis

Penulisan tesis ini akan dilakukan dalam lima bab, yaitu Bab 1 berisi latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. Bab 2 akan diuraikan tinjauan pustaka tentang konsep, landasan, hakikat dan tujuan, visi dan misi, serta ruang lingkup pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, diuraikan juga tentang pengertian, hakikat, tujuan dan ciri-ciri, karakteristik, manfaat, keunggulan dan kelemahan, langkah-langkah *problem based learning*, keterampilan kewarganegaraan, keterampilan intelektual, dan keterampilan partisipatoris, meningkatkan keterampilan kewarganegaraan melalui *Problem Based Learning* (PBL), penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran, hipotesis penelitian.

Bab 3 akan diuraikan desain penelitian, populasi dan subjek/sampel penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. Bab 4 akan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, hasil temuan secara deskriptif, pembahasan hasil penelitian: kondisi keterampilan kewarganegaraan siswa, proses pembelajaran *problem based learning*, perbedaan keterampilan intelektual siswa, perbedaan keterampilan partisipatoris siswa, efektivitas model pembelajaran PBL dalam meningkatkan keterampilan intelektual siswa, dan efektivitas model pembelajaran PBL dalam meningkatkan keterampilan partisipatoris siswa . Bab 5 akan dirumuskan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian.